



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Agustus 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUSAIRI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 486504

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.190.490.000**

1. Tanah Seluas 120 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 26.420.000
2. Tanah Seluas 1210 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 323.070.000
3. Tanah Seluas 439 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 121.000.000
4. Tanah Seluas 195 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 5000 m2 di KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 120 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 136.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI AV 1414FSDXL4X2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA NF100TD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.



4.500.000

3. MOTOR, HONDA 109,1CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 484.663.900

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.525.463.134

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.336.617.034

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.336.617.034

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.